

SIMULASI DAMPAK KENAIKAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

Indra Maipita

imaipita@gmail.com, imaipita@unimed.ac.id

Univesitas Negeri Medan

ABSTRACT

This research is aimed at analyzing the impact of minimum wage hike toward macro economy indicators, income and poverty level. In order to attain these, Computable General Equilibrium and Foster-Greer-Thorbecke index were used. Policy simulations conducted with a simulated ex ante forecasting based on historical policy by changing the value of the policy variable. Simulations carried out by raising the regional minimum wage (UMR) by 6.61 percent (simulation-1) and 9.33 percent (simulation 2). The results of simulations, show that the impact of increased of minimum wage on increasing the income of workers and employees and reduce poverty in the group. But, the result of the study reveals that in general, the minimum wage hike recedes macro economy performances, increases good price, decreases purchasing power, export ,sectoral output and slightly increases poor households. In others words, the impact of wokers' income rise is resulted by the policy of increasing the minimum pay, totally could not be able to equalise the negative effect of that policy in the form of declining the earning rate of other households.

Keywords: minimum wage, income, and poverty.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan upah minimum terhadap indikator ekonomi makro, tingkat pendapatan, dan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan analisis model *Computable General Equilibrium* sedangkan untuk melihat perubahan kemiskinan digunakan *Foster-Greer-Thorbecke index*. Simulasi kebijakan dilakukan dengan *ex ante forecasting*, berupa simulasi yang didasarkan pada kebijakan historis dengan mengubah nilai variabel kebijakan. Simulasi dilakukan dengan menaikkan Upah Minimum Regional (UMR) riil sebesar 6,61 persen (simulasi-1) dan 9,33 persen (simulasi-2). Hasil simulasi menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum berdampak terhadap meningkatnya pendapatan kelompok buruh dan pekerja serta menurunkan angka kemiskinan pada kemlompok tersebut. Namun, secara umum dalam jangka pendek menurunkan kinerja ekonomi makro, menaikkan tingkat harga, menurunkan tingkat konsumsi, ekspor, output sektoral serta menambah jumlah rumah tangga miskin secara total meskipun relatif kecil. Dengan kata lain, dampak kenaikan pendapatan para pekerja akibat kebijakan menaikkan upah minimum, secara total tidak dapat mengimbangi dampak negatif dari kebijakan tersebut, berupa penurunan tingkat pendapatan dari kelompok rumah tangga lainnya.

Kata kunci: upah Minimum, pendapatan, dan kemiskinan.

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan penghasilan pekerja menuju penghasilan yang layak, maka sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003, perlu ditetapkan upah minimum dengan tetap mempertimbangkan produktivitas, kemajuan perusahaan,

dan perekonomian pada umumnya (Pitaya, 2006; Saget, 2006). Cara pandang terhadap upah minimum masih menjadi perdebatan antara pengusaha, pekerja, pemerintah, bahkan ekonom dan akademisi.

Dari sisi pekerja, upah merupakan hak yang harus mereka terima dan upah mesti-

nya mampu memenuhi kebutuhan hidup layak (UU No. 13 tahun 2003).

Meski demikian, menurut laporan *International Labour Organization* (ILO) tahun 2013, pada Agustus 2013 diperkirakan sebanyak 36,2 persen pekerja masih memperoleh upah di bawah upah minimum.

Kenaikan upah berarti menaikkan tingkat kesejahteraan pekerja, sehingga upah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan (Putri dan Yuliarni, 2013). Dari sisi pengusaha, upah merupakan *cost of production*, kenaikan harga faktor produksi merupakan kenaikan biaya produksi, dapat mengurangi keuntungan bahkan menaikkan harga produksi. Kajian Islam dan Nazara (2000) menyimpulkan bahwa tidak ada bukti kenaikan upah minimum mengurangi keuntungan perusahaan skala besar dan menengah. Naiknya biaya produksi dapat memicu terjadinya inflasi melalui kenaikan harga output, menurunkan daya beli, menurunkan ekspor, mengurangi output, menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan menambah angka kemiskinan, walau pun terkadang pertumbuhan yang tinggi juga diiringi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi pula (Suselo dan Tarsidin, 2008).

Harga faktor produksi tenaga kerja (tingkat upah) dapat bersifat *trade-off* dengan lapangan kerja, artinya semakin tinggi upah, permintaan tenaga kerja akan semakin berkurang dan pengusaha akan cenderung mensubstitusinya dengan modal. Usaha yang sebelumnya bersifat padat karya secara perlahan akan berpindah menjadi padat modal. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat memicu meningkatnya angka pengangguran yang bermuara pada kemiskinan. Sebagian berpendapat bahwa kenaikan upah dapat memicu kenaikan produktivitas pekerja, namun sebagian lagi justru mendapati bahwa tidak ada efek kerja dari upah minimum, yang terlihat hanya sedikit manfaat bagi buruh (Simon dan Kaestner, 2004).

Dari sisi lapangan kerja, penetapan upah minimum dapat menyebabkan persis-

tensi pengangguran melalui kekakuan upah (*wage rigidity*) baik nominal maupun riil yang akhirnya dapat memicu meningkatnya angka kemiskinan. Kekakuan upah nominal terjadi ketika tingkat upah berada di atas atau di bawah tingkat keseimbangan dan sulit untuk mencapai keseimbangan tersebut. Soekarni *et al.* (2009) melakukan kajian mengenai persistensi pengangguran di Indonesia, menggunakan data mikro kurun waktu 1991-2006, ditemukan bahwa upah nominal bersifat kaku ke bawah dan tidak simetris. Artinya mudah mengalami kenaikan tetapi sulit untuk turun. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan penetapan upah minimum. Dalam periode penelitian juga ditemukan bahwa penyesuaian tingkat upah minimum lebih tinggi dibanding tingkat inflasi.

Berbagai kajian menyatakan bahwa dinamika kemiskinan di Indonesia seringkali tidak sejalan dengan berbagai kebijakan dan pertumbuhan ekonomi (Suselo dan Tarsidin, 2008). Kebijakan peningkatan upah minimum dengan maksud mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, masih berdampak positif terhadap sedikit golongan tenaga kerja, terutama yang berlatar produktivitas tinggi, namun golongan ini relatif lebih kecil dibanding dengan yang memiliki produktivitas rendah.

Kajian ini tidak membahas berapa tingkat upah yang layak bagi pekerja dan pengusaha, tetapi hanya membahas dampaknya terhadap ekonomi makro. Menggunakan simulasi model CGE, kajian ini berusaha untuk melihat dampak kenaikan upah terhadap beberapa indikator perekonomian secara makro serta tingkat pendapatan dan kemiskinan rumah tangga, karena menurunkan angka kemiskinan telah menjadi tujuan utama dari kebijakan publik di hampir semua negara termasuk negara industri (Moller *et al.*, 2003).

TINJAUAN TEORETIS

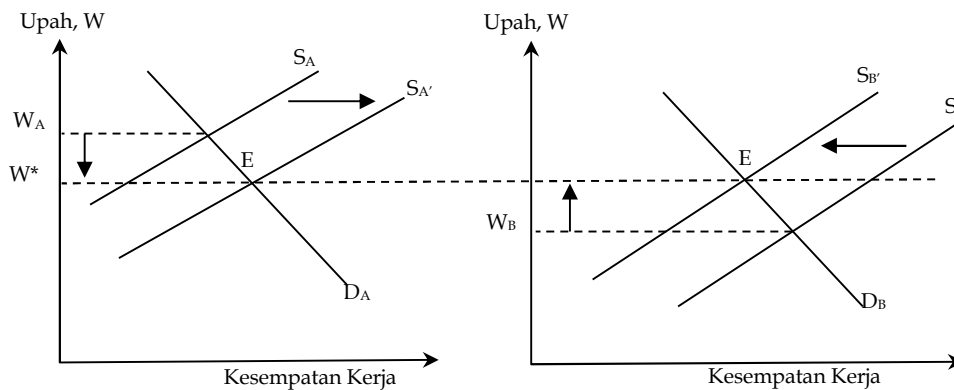
Penetapan upah minimum sering menjadi perdebatan terutama dari sisi dampaknya (Teulings, 2003; Neumark And

Nizalova, 2007; Flinn, 2006). Apakah upah minimum akan mengurangi kesempatan kerja seperti yang sering disampaikan pada buku standar permintaan tenaga kerja (Stewart, 2004)? Namun dalam berbagai kajian dan kasus lain seperti kondisi monopsoni dan efisiensi upah, kenaikan tingkat upah minimum justru dapat meningkatkan kinerja para pekerja.

Dalam konsep teori produksi yang sederhana, *marginal physical product* dalam jangka pendek selalu mengalami *diminishing return*. Akibatnya perusahaan akan menambah input tenaga kerja bila tambahan tingkat upah tenaga kerja tersebut lebih rendah dari tenaga kerja sebelumnya, karena setiap tenaga kerja tambahan akan menghasilkan tambahan output yang lebih sedikit dari tenaga kerja sebelumnya.

Dengan asumsi bahwa tenaga kerja bersifat *mobile* dan memiliki keterampilan yang dapat bersaing (relatif sama), maka kese-

imbangan tingkat upah antar pasar atau wilayah diperlihatkan pada Gambar 1. Konsep dasarnya adalah bahwa pekerja akan cenderung mencari tingkat upah yang lebih tinggi, sedangkan perusahaan justru sebaliknya. Andaikan tingkat upah di wilayah A yaitu W_A lebih tinggi dari upah di wilayah B yaitu W_B , sehingga pekerja dari wilayah B akan berusaha untuk pindah ke wilayah A guna mengejar tingkat upah yang lebih tinggi. Migrasi pekerja ini akan menggeser kurva penawaran tenaga kerja di wilayah B dari S_B ke $S_{B'}$. Pengurangan tenaga kerja ini akan menaikkan tingkat upah di B dari W_B ke W^* . Di sisi lain, akibat migrasi dari wilayah B menyebabkan kurva penawaran bergeser dari S_A ke $S_{A'}$. Kondisi ini mengakibatkan kelebihan penawaran yang menyebabkan penurunan tingkat upah dari W_A ke W^* . Dampak dari situasi ini bahwa dalam jangka tertentu tingkat upah akan menuju kondisi keseimbangan.



Gambar 1
Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja Kompetitif

Konsep keseimbangan yang di bahas di atas merupakan konsep keseimbangan parsial. Dalam kondisi riil, keseimbangan merupakan interaksi simultan dari banyak pasar dan pelaku (Maipita et al., 2012). *Computable General Equilibrium (CGE) Model*, merupakan suatu model yang mampu melihat secara simultan interaksi tersebut.

Secara garis besar, persamaan-persamaan dalam model dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, yaitu: (1) *Domestic-import*

sourcing, yaitu persamaan yang berkaitan dengan komposisi permintaan menurut asal (domestik dan impor), didasarkan pada spesifikasi Armington, (2) *Purchase'r price*, yaitu persamaan yang menghubungkan harga produsen atau harga internasional dengan harga pembeli, (3) *Demand for commodity*, yaitu persamaan yang berkaitan dengan permintaan barang oleh berbagai pengguna, (4) *Production sector*, berisi persamaan yang berhubungan dengan produksi,

baik barang maupun jasa, (5) *Market clearing*, berisi persamaan yang berhubungan dengan kondisi *market clearing* yang di dalamnya penawaran sama dengan permintaan baik untuk komoditi maupun faktor produksi, (6) *Institution*, berisi persamaan yang berhubungan dengan pendapatan (*income*) dan pengeluaran institusi rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan luar negeri, dan (7) *Closure* (Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Republik Indonesia (BKFDK-RI), 2008a). *Closure* yang digunakan pada model merupakan *closure* jangka panjang, yang di dalamnya tingkat harga dan upah akan fleksibel dalam memberi tingkat keseimbangan yang baru.

Pelaku ekonomi mengoptimalkan komposisi impor dan domestik dengan cara meminimalkan biaya dengan kendala fungsi agregasi *Constant Elasticity of Substitution* (CES) sebagai berikut:

$$\text{Minimize : } \sum_s PQ(c,s).XD(c,s) \tag{1}$$

Dengan kendala:

$$XD_S(c) = CES(XD(c,s) | \uparrow (c)) = \left(r(c,s) \sum_s u(c,s)^{-\frac{1}{\sigma(c)}} \right)^{-\frac{1}{\sigma(c)}} \tag{2}$$

dengan $PQ(c,s)$ adalah *consumer price for commodity c by source s*, $XD(c,s)$ adalah *demand for commodity c, source s*, $XD_S(c)$ adalah *demand for commodity composite*, $r(c,s)$ adalah *economic scale*, dan $u(c,s)$ adalah elastisitas substitusi c,s .

$$XTOT(i) = \frac{1}{ATOT(i)} \cdot \text{MIN} \left[\text{all}, c, \text{com} : \frac{XINT_S(c,i)}{AINT(c,i)}, \frac{XPRIM(i)}{APRIM(i)} \right] \tag{5}$$

Sedangkan persamaan untuk *intermediate goods*nya menjadi:

$$\frac{XINT_S(c,i)}{ATOT(i)} = XTOT(i) \tag{6}$$

dengan $PPRIM(i)$ adalah *price of primary factor composite by industry*, $XPRIM(i)$ adalah *demand of primary factor composite by industry*, $XINT_S(c,i)$ adalah *demand for commodity by industry*, $XTOT(i)$ adalah *output or supply commodity*, $ATOT(i)$ adalah *all factors technical*

Harga yang diterima oleh konsumen merupakan harga bersih setelah dikenakan pajak dan atau subsidi. Oleh karena itu, harga yang diterima konsumen dapat dituliskan pada persamaan tingkat level berikut:

$$PQ(c, "dom") = (1 + TX(c) - SC(c)).PTOT(c) \tag{3}$$

dengan $PQ(c, "dom")$ adalah harga domestik tiap komoditi c yang diterima konsumen, $TX(c)$ adalah pajak yang dikenakan tiap komoditi c , $SC(c)$ adalah subsidi yang dikenakan untuk tiap komoditi c , dan $PTOT(c)$ adalah harga barang tiap komoditi c yang diterima konsumen. Karena harga domestik berhubungan dengan harga internasional, tarif, dan nilai tukar, maka persamaan harga domestik untuk tiap komoditi impor menjadi:

$$PQ(c, "imp") = EXR.(1 + tm(c)).PFIMP(c) \tag{4}$$

dengan $PQ(c, "imp")$ merupakan harga domestik untuk tiap komoditi impor, EXR adalah *exchange rate*, $tm(c)$ adalah tarif impor untuk tiap komoditi c , dan $PFIMP(c)$ adalah harga impor tiap komoditi c .

Permintaan untuk setiap komoditas diperoleh dengan cara minimalisasi biaya dengan kendala fungsi produksi Leontief.

$$\begin{aligned} \min : & PPRIM(i).XPRIM(i) + \\ & \sum_c PQ_S(c).XINT_S(c,i) \quad \text{s.t.} \end{aligned}$$

change, dan $APRIM(i)$ adalah *Armington elasticity*.

Persamaan permintaan faktor produksi diperoleh dari minimalisasi biaya dengan kendala fungsi produksi CES.

$$\begin{aligned} \min : & \sum_f WDIST(f,i).PFAC(f).XFAC(f,i) \\ & \text{subject to} \\ XPRIM(i) = & \left[\sum_f u_f \left(\frac{XFAC(f,i)}{AFAC(f,i)} \right)^{-\frac{1}{\sigma}} \right]^{-\frac{1}{\sigma}} \tag{7} \end{aligned}$$

dengan $XFAC(f,i)$ adalah *demand for factor f by industry i*, $PFAC(f)$ adalah harga faktor produksi f , $WDIST(f,i)$ adalah *distortion premium* untuk faktor f di industri i , dan $XPRIM(i)$ adalah *total value added*.

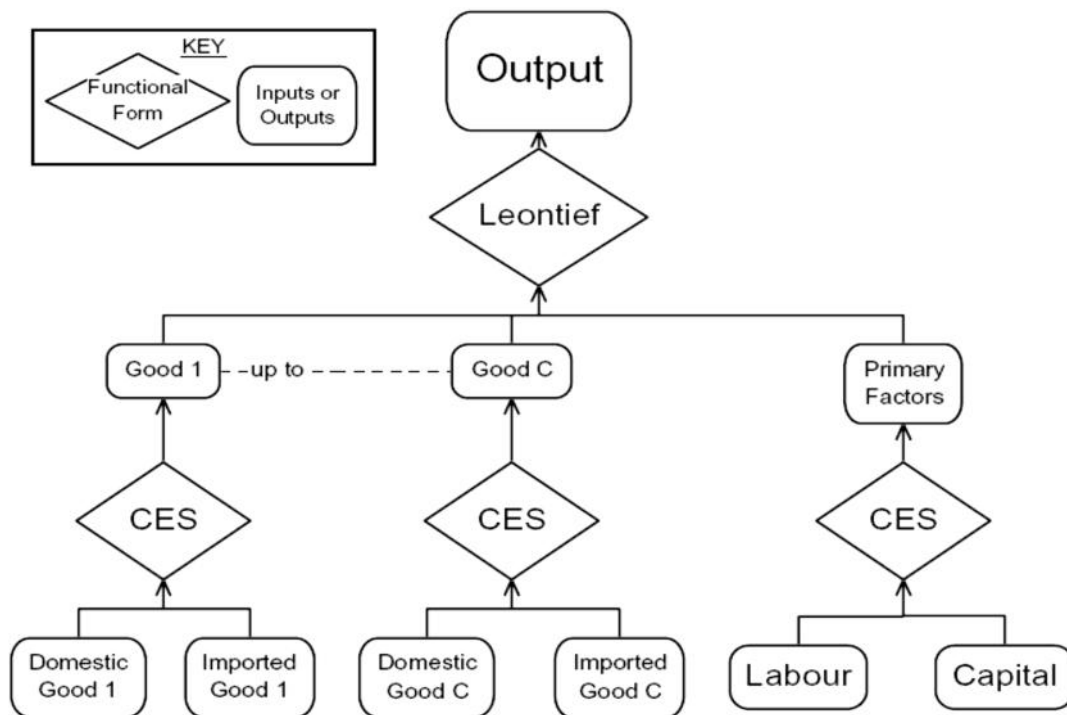
Dalam *merket clearing*, *total output* atau *supply commodity* harus sama dengan jumlah permintaan barang. Permintaan barang di sini terdiri atas permintaan barang sumber domestik dan permintaan barang ekspor.

Dalam bentuk level, persamaan matematikanya dituliskan pada persamaan (8).

$$XTOT(c) = XD(c, "dom") + XEXP(c) \quad (8)$$

dengan $XTOT(c)$ adalah *total output komoditi c*, $XD(c, "dom")$ adalah *total permintaan komoditi, c sumber domestik*, dan $XEXP(c)$ adalah *permintaan komoditi c sumber ekspor*.

Struktur produksi yang digunakan dalam model ini diperlihatkan pada Gambar 2 berikut ini.



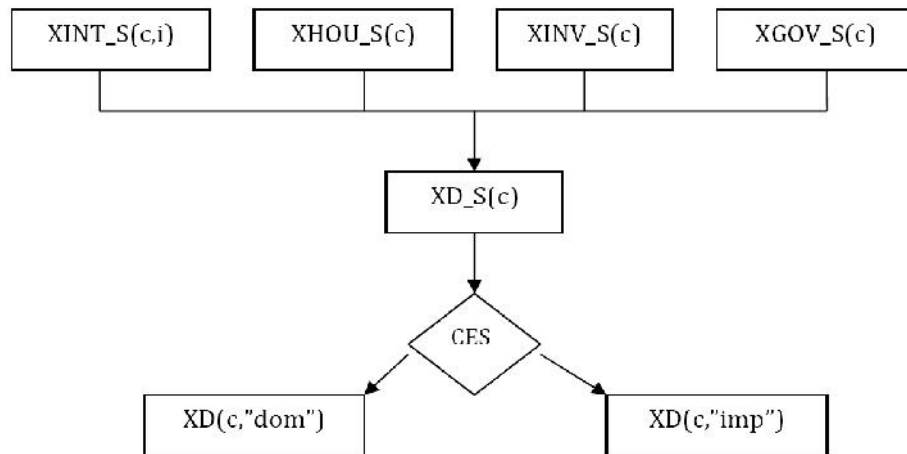
Gambar 2
Struktur Produksi dalam Model

Sumber: BKFDK-RI (2008); Yusuf et al., (2007)

Permintaan terhadap barang komposit terdiri atas empat jenis, yaitu: (1) permintaan barang untuk investasi, (2) permintaan barang oleh industri untuk bahan baku, (3) permintaan terhadap barang untuk konsumsi rumah tangga, dan (4) permintaan barang oleh pemerintah. Struktur permintaan terhadap barang ini disarikan pada Gambar 3.

Rumah tangga diasumsikan memaksimalkan utilitasnya dengan kendala angga-

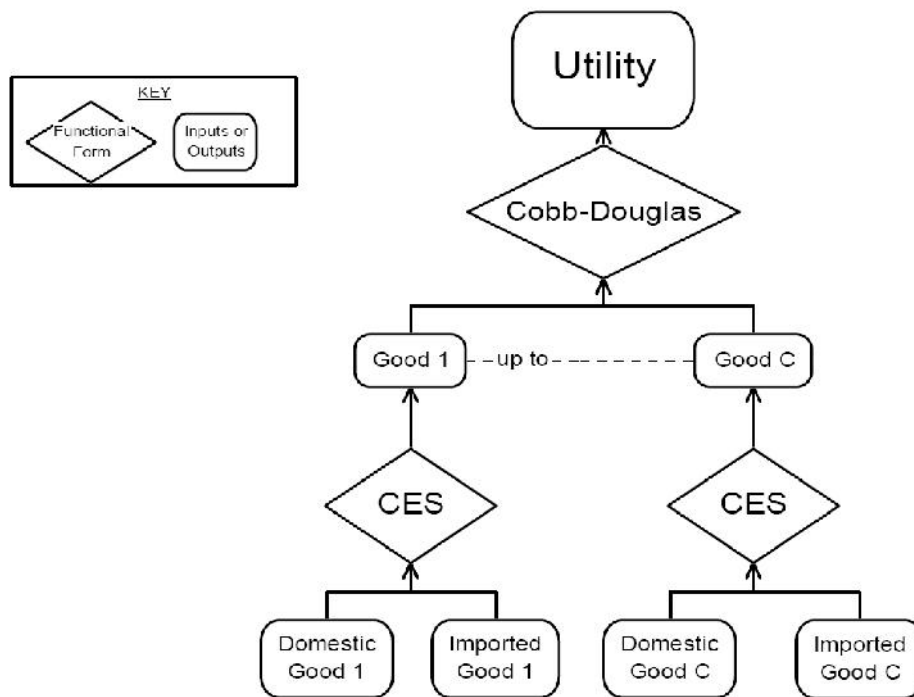
ran yang ada. Sebagaimana institusi lainnya, rumah tangga dapat memilih dan mencari keseimbangan optimal antara pilihan komoditas satu dengan lainnya. Kemungkinan substitusi ini yang melandasi penggunaan fungsi agregator Cobb-Douglas seperti diperlihatkan pada Gambar 4. Terhadap pilihan asal komoditas, yaitu produk domestik dan impor, rumah tangga menentukan komposit komoditi c berdasarkan *nesting* CES.



Gambar 3

Permintaan terhadap Barang Komposit

Sumber: BKFDK-RI, (2008a); Yusuf et al., (2007)



Gambar 4

Permintaan Rumah Tangga

Sumber: BKFDK-RI, (2008a)

Rumah tangga memperoleh pendapatan dari kepemilikan atas faktor produksi. Selain itu, rumah tangga juga memperoleh pendapatan dari berbagai transfer yang bersumber dari: (1) pemerintah pusat, (2)

perusahaan, (3) asing atau luar negeri, dan dari (4) rumah tangga lainnya. Dengan demikian dalam bentuk *level*, persamaan dari pendapatan rumah tangga didefinisi pada persamaan (9).

$$YH = \sum_f SFACSH(f)YFAC(f) + TRHOGO + TRHOCO + TRHORO + TRHOHO \quad (9)$$

dengan *YH* adalah pendapatan rumah tangga, *SFACSH* adalah *share* pendapatan dari faktor produksi. Hal ini terjadi karena kepemilikan faktor produksi dalam suatu perekonomian bukan saja rumah tangga tetapi dapat juga perusahaan dan pemerintah. *YFAC* adalah faktor pendapatan, *TRHOGO* adalah transfer dari pemerintah ke rumah tangga, *TRHOCO* adalah transfer dari perusahaan ke rumah tangga (sebagai contoh, beasiswa dan *corporate social responsibility*), *TRHORO* adalah transfer dari *rest of the world* ke rumah tangga, *TRHOHO* adalah transfer antar rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan model keseimbangan umum (*Computable General Equilibrium Model*), diadaptasi dari model *AGEFIS* (*Applied General Equilibrium for Fiscal Policy*), yang dikembangkan oleh Badan Kebijakan

Fiskal Departemen Keuangan Republik Indonesia bekerjasama dengan *Center for Economics and Development Studies* (CEDs) Universitas Padjadjaran Bandung (BKFDK-RI, 2008; 2008a; Yusuf *et al.*, 2007).

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar merupakan data sekunder, yaitu *Social Accounting Matrix* (SAM) Indonesia tahun 2008 dan data indikator kemiskinan Indonesia. Garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan Maret 2013 yang dipublikasi oleh BPS (2013). Faktor produksi diintegrasikan menjadi dua jenis, yaitu tenaga kerja dan modal, sedangkan institusi dalam penelitian ini sama dengan institusi dalam SAM Indonesia 2008 yang terdiri atas rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Sektor tenaga kerja dalam model dibagi ke dalam 16 kelompok seperti diperlihatkan pada tabel 1.

Tabel 1
Sektor Tenaga Kerja dalam Model

Sektor Tenaga Kerja		Kode	
Pertanian	Penerima Upah dan Gaji	Desa	LAB 01
		Kota	LAB 02
	Bukan Penerima Upah dan Gaji	Desa	LAB 03
		Kota	LAB 04
Produksi, Operator Alat Angkutan, Manual dan buruh kasar	Penerima Upah dan Gaji	Desa	LAB 05
		Kota	LAB 06
	Bukan Penerima Upah dan Gaji	Desa	LAB 07
		Kota	LAB 08
Tata Usaha, Penjualan, Jasa-Jasa	Penerima Upah dan Gaji	Desa	LAB 09
		Kota	LAB 010
	Bukan Penerima Upah dan Gaji	Desa	LAB 011
		Kota	LAB 012
Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Profesional dan Teknisi	Penerima Upah dan Gaji	Desa	LAB 013
		Kota	LAB 014
	Bukan Penerima Upah dan Gaji	Desa	LAB 015
		Kota	LAB 016

Kelompok rumah tangga dibagi ke dalam 10 kelompok sesuai dengan Tabel SAM tahun 2008 (tabel 2), namun untuk keperluan analisis dampak terhadap kemiskinan, maka rumah tangga yang ada diintegrasikan menjadi 14 kelompok, dengan memisahkan

antara rumah tangga yang berada di kota dengan di desa. Hal ini dilakukan karena perbedaan garis kemiskinan di kota dengan di desa (BPS, 2013). Tingkat pendapatan rumah tangga diperoleh dari data Susenas

dengan total rumah tangga dalam kajian ini sebanyak 70.157 rumah tangga.

Data pendapatan rumah tangga yang dijadikan sebagai baseline, diperoleh dari data Susenas. Jumlah rumah tangga yang digunakan dalam kajian ini sebanyak 70.157 rumah tangga yang tersebar pada semua kelompok rumah tangga seperti pada Tabel 2. Sektor produksi (industri dan komoditas)

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 24 sektor (table 3).

Simulasi kebijakan dilakukan dengan *ex ante forecasting* berupa simulasi yang didasarkan pada kebijakan historis dengan mengubah nilai variabel kebijakan.

Simulasi yang dilakukan adalah menaikkan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar 6,61 persen (simulasi-1) dan 9,33 persen (simulasi-2).

Tabel 2
Kelompok Rumah Tangga dalam Model

		Rumah tangga	Kode
Pertanian	Buruh		HH01
	Pengusaha Pertanian	Pengusaha memiliki tanah 0,000 ha - 0,500 ha	HH02
		Pengusaha memiliki tanah 0,500 ha -1,00 ha	HH03
		Pengusaha memiliki tanah 1,000 ha lebih	HH04
Bukan Pertanian	Pedesaan	Pengusaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar	HH05
		Bukan angkatan kerja dan golongan tidak jelas	HH06
	Perkotaan	Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja TU dan penjualan golongan atas	HH07
		Pengusaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar	HH08
		Bukan angkatan kerja dan golongan tidak jelas	HH09
		Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja TU dan penjualan golongan atas	HH10

Kedua besaran ini diperoleh dari data historis, yaitu rata-rata perubahan UMR tahun 2012-2013 untuk 33 provinsi di Indonesia sebesar 15,61 persen. Dengan tingkat inflasi tahun 2013 (perkiraan Bank Indonesia) sebesar 9 persen, maka diperoleh kenaikan UMR riil sebesar 6,61 persen, sedangkan besaran simulasi ke dua diperoleh dari rata-rata kenaikan UMR tahun 2014 (ditetapkan tahun 2013) sebesar 14,83 persen, dengan perkiraan tingkat inflasi sebesar 5,5 persen, maka perubahan UMR riil sebesar 9,33 persen. Kenaikan UMR diberikan kepada faktor produksi dalam hal ini tenaga kerja

penerima upah dan gaji. Pada model CGE yang digunakan, faktor produksi tenaga kerja terdiri atas 16 kelompok seperti diperlihatkan pada Tabel 1.

Shock atas kenaikan UMR diberikan kepada tenaga kerja LAB 01, 02, 05, 06, 09, 10, 13, dan 14.

Besarnya dampak kebijakan terhadap tingkat pendapatan rumah tangga diperoleh dari hasil simulasi CGE, sedangkan besarnya dampak tersebut terhadap tingkat kemiskinan digunakan metode Foster-Greer-Thorbecke (FGT), seperti digunakan oleh Son dan Kakwani (2004).

Tabel 3
Daftar Sektor Produksi dalam Penelitian

No	Sektor Pada: SAM	Penelitian
1	Pertanian Tanaman Pangan	OTHCRP
2	Pertanian Tanaman Lainnya	LIVSTK
3	Peternakan dan Hasil-hasilnya	FOREST
4	Kehutanan dan Perburuan	FISH
5	Perikanan	MINE
6	Pertambangan Batubara, Biji Logam dan Minyak Bumi	OTHMINE
7	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	FOOD
8	Industri Makanan, Minuman dan Tembakau	TEXTILE
9	Industri Pemintalan, Tekstil, Pakaian dan Kulit	WOODP
10	Industri Kayu & Barang Dari Kayu	PAPER
11	Industri Kertas, Percetakan, Alat Angkutan dan Barang dari Logam dan Industri	CHEM
12	Industri Kimia, Pupuk, Hasil Dari Tanah Liat, Semen	ELECTR
13	Listrik, Gas Dan Air Minum	CONSTRU
14	Konstruksi	TRADE
15	Perdagangan	RESTAU
16	Restoran	HOTEL
17	Perhotelan	LNDTRAN
18	Angkutan Darat	AIRTRAN
19	Angkutan Udara, Air dan Komunikasi	WTRTRAN
20	Jasa Penunjang Angkutan, dan Pergudangan	BANK
21	Bank dan Asuransi	ESTATE
22	Real Estate dan Jasa Perusahaan	GOVSER
23	Pemerintahan dan Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, Film dan Jasa Sosial Lainnya	OTHSER
24	Jasa Perseorangan, Rumah tangga dan Jasa Lainnya	OTHCRP

Jika rata-rata pendapatan dalam suatu kelompok rumah tangga meningkat sebesar ψ , maka pendapatan setiap rumah tangga dalam kelompok juga meningkat sebesar ψ . Dengan aturan ini, distribusi pendapatan secara proporsional akan bergeser secara horizontal di dalam pendapatan. Aturan ini mengizinkan untuk membandingkan tingkat kemiskinan yang dihasilkan pada kasus sebelum dengan sesudah simulasi (Son dan Kakwani, 2004a; Maipita *et al.*, 2012; Jantan *et al.*, 2013). Bentuk persamaan FGT yang digunakan diperlihatkan pada persamaan (10) (Cockburn, 2001; Maipita, 2013).

$$P_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{g_i}{z} \right]^\alpha ; \alpha \geq 0; g_i = \frac{z - y_i}{z} \quad (10)$$

dengan y_i merupakan rata-rata pendapatan atau pengeluaran penduduk miskin dengan batasan $g_i=0$ saat $y_i > z$, n merupakan jumlah individu dalam populasi, q adalah jumlah rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan, g_i adalah *poverty gap* dari rumah tangga ke- i , z adalah garis kemiskinan, P_a merupakan indeks kemiskinan menurut FGT, dan a merupakan derajat kemiskinan.

Bila $a=0$, maka P_0 disebut juga dengan *head count index*, menunjukkan proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Didefenisi sebagai persentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk. Bila $a=1$, maka diperoleh indeks P_1 . Indeks ini digunakan untuk mengukur kedalaman kemiskinan atau jurang kemiski-

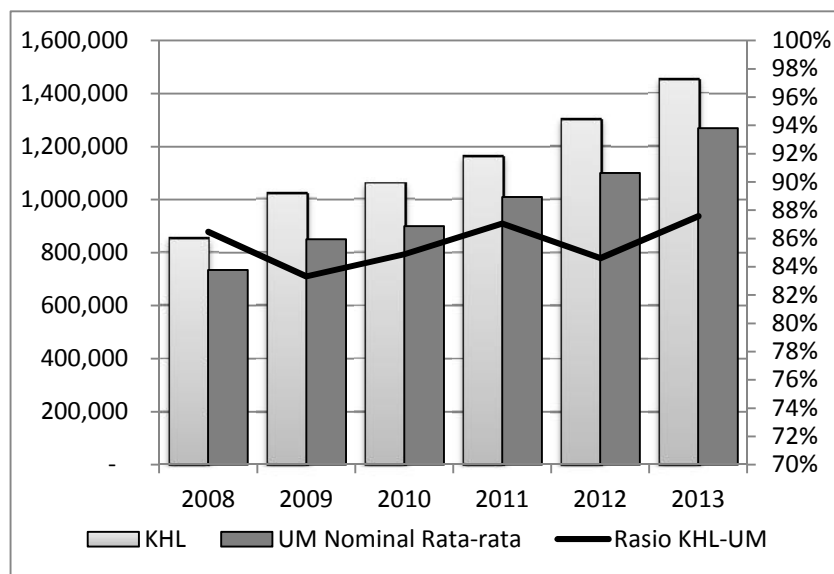
nan (*depth of poverty index*) atau tingkat kesenjangan kemiskinan (*poverty gap index*). Indeks ini menggambarkan ukuran rata-rata ketimpangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau total kesenjangan dari seluruh rumah tangga dalam kelompok terhadap garis kemiskinan. Bila $a=2$, maka diperoleh indeks P_2 . Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*) (Maipita *et al.*, 2010; Maipita, 2010; 2013).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Setiap tahun, upah minimum hampir selalu mengalami kenaikan, meskipun besarnya bervariasi antar daerah di Indonesia. Kenaikan ini ditujukan untuk menyesuaikan dengan kenaikan biaya hidup di masing-masing daerah. Inflasi yang terjadi di satu sisi

menaikkan biaya hidup karena naiknya harga-harga barang, sedangkan di sisi lain secara riil menurunkan tingkat upah atau daya beli para masyarakat khususnya para pekerja. Untuk mengimbangi hal tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan cara menaikkan tingkat upah (dalam kajian ini, yang dimaksud adalah Upah Minimum Regional-UMR).

Upah merupakan pendapatan utama bagi pekerja, dan tinggi rendahnya pendapatan dapat mempengaruhi apakah ia atau rumah tangganya akan menjadi miskin atau tidak. Dari sisi keperluan hidup layak (KHL), besaran upah minimum yang ditetapkan belum pernah mencapai layak, setidaknya kurun waktu 2008-2013 seperti diperlihatkan pada Gambar 5 berikut ini.



Gambar 5

Perbandingan Upah Minimum dan Kebutuhan Hidup Layak

Sumber: ILO (2013)

Berdasarkan data BPS, rasio upah minimum terhadap upah buruh di sektor padat karya (sektor pertanian, industri, bangunan, dan perdagangan) relatif tinggi (di atas 0,60). Bahkan pada sektor pertanian kurun waktu 7 tahun terakhir rata-rata mencapai 100 persen. Artinya bahwa upah minimum yang ditetapkan

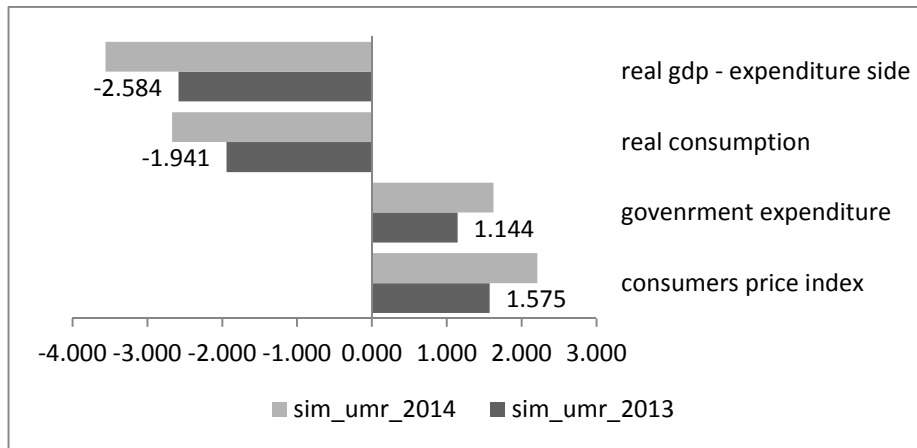
kan pemerintah merupakan upah maksimum pada sektor padat karya, terlebih pada sektor pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor padat karya sangat responsif terhadap kenaikan upah minimum, baik dari sisi industri atau pengusahanya maupun dari sisi pekerjanya.

Pada pembahasan berikut ini, dampak simulasi terhadap tingkat pendapatan dan kemiskinan hanya membahas simulasi kenaikan UMR tahun 2014, sedangkan kenaikan UMR tahun 2013 tidak dibahas karena telah berlalu. Namun, dampak terhadap indikator ekonomi makro akan dibahas keduanya, terutama sebagai bahan perbandingan.

Dampak Simulasi terhadap Indikator Ekonomi Makro

Dampak simulasi terhadap indikator makro ekonomi Indonesia ditunjukkan oleh

pertumbuhan dari PDB riil, konsumsi riil, pengeluaran pemerintah, dan Indeks Harga Konsumen. Keempat indikator ini diperlihatkan pada Gambar 6. Hasil simulasi menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan PDB relatif terhadap *baseline* untuk kedua simulasi. Penurunan PDB terjadi karena adanya kenaikan dari harga faktor primer yaitu upah buruh untuk kedua simulasi yang pada gilirannya akan menaikkan ongkos produksi dan peningkatan *opportunity cost* bagi penggunaan barang modal.



Gambar 6

Dampak Simulasi terhadap Indikator Ekonomi Makro (%)

Sumber: Hasil Penelitian

Kenaikan biaya produksi ini menimbulkan kenaikan harga barang dilihat dari indeks harga konsumen yang naik dan menimbulkan penurunan daya beli dari rumah tangga (*real consumption*). Kenaikan harga ini juga berdampak pada pemerintah berupa naiknya pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa. Secara umum terlihat bahwa kenaikan upah minimum untuk kedua simulasi memberi dampak negatif bagi keempat indikator ekonomi makro tersebut.

Secara umum, dampak simulasi kenaikan upah tahun 2014 lebih tinggi dibanding dampak kenaikan upah tahun 2013. Hal ini disebabkan secara nominal, kenaikan upah tahun 2014 memang lebih tinggi dibanding kenaikan upah tahun 2013. Akibatnya kenaikan ongkos produksi dari kenaikan harga

faktor buruh tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2013.

Simulasi kenaikan upah minimum, memberi dampak terhadap pengurangan output sektoral untuk semua sektor meskipun bervariasi. Pengurangan ini terjadi akibat adanya kenaikan harga faktor produksi tenaga kerja yang mendorong naiknya harga output (inflasi-IHK meningkat), dan menurunnya tingkat konsumsi serta ekspor (lihat tabel 4). Lima sektor (dari 24 sektor produksi dalam model) yang menerima dampak terkecil berturut-turut adalah: (1) sektor Konstruksi, (2) Pertambangan dan Penggalian lainnya, (3) Kehutanan dan Perburuan, (4) Transportasi Darat, dan (5) sektor Perikanan, sedangkan sektor yang menerima dampak pengurangan terbesar berturut-turut adalah:

(1) sektor Perhotelan, (2) Industri Pemintalan, Tekstil, Pakaian dan Kulit, (3) Perdagangan, (4) Pertanian Tanaman Lainnya, dan (5) sektor Industri Kimia, Pupuk, Hasil dari Tanah Liat dan Semen. Kondisi ini berhubungan dengan kajian Simon dan Kaesnert (2004) bahwa kenaikan upah tidak ber-

dampak terhadap peningkatan produktivitas pekerja yang akhirnya juga meningkatkan output. Bahkan upah minimum terkadang dapat menjadi penghambat bagi pengusaha untuk melakukan ekspansi (Das dan Bank Dunia, 2004).

Tabel 4
Dampak Simulasi Terhadap Perubahan Harga-Harga

Deskripsi	Perubahan (%)	
	Sim 1	Sim 2
<i>price of consumption</i>	1,574550	2,210391
<i>price of export</i>	1,307533	1,833492
<i>gdp deflator - expenditure side</i>	1,696729	2,383699
<i>price of government spending</i>	2,903682	4,087058
<i>price of import</i>	0,000000	0,000000
<i>price of investment</i>	1,488358	2,090194
<i>nominal consumption</i>	-0,396873	-0,518413
<i>nominal export</i>	-5,063538	-7,009742
<i>gdp from expenditure side</i>	-0,930756	-1,261732
<i>nominal GDP from income side</i>	-0,926631	-1,255728
<i>nominal government spending</i>	2,903682	4,087058

Sumber: Hasil Penelitian

Sim1: Simulasi menaikkan upah sebesar 6,61 persen; Sim2: menaikkan upah sebesar 9,33 persen

Perbedaan dampak yang diterima oleh setiap sektor industri antara lain disebabkan perbedaan penggunaan tenaga kerja terampil (terdidik) dan tidak terampil. Semakin banyak tenaga kerja terampil yang digunakan suatu sektor, maka dampak negatifnya juga akan semakin besar dirasakan oleh sektor tersebut. Sektor dengan tenaga kerja tidak terdidik memiliki tingkat upah yang relatif lebih rendah dan elastisitas yang lebih kecil terhadap perubahan upah. Selain itu komposisi faktor produksi yang digunakan (padat modal atau padat karya) juga berpengaruh langsung dari kenaikan upah. Sektor produksi yang cenderung padat karya akan merasakan dampak yang lebih besar, dan sebaliknya.

Di sisi lain, penurunan output dapat menurunkan *sharenya* terhadap PDB, dan akhirnya berpengaruh terhadap serapan tenaga kerja, pengangguran, dan kemiskinan. Kajian Tarsidin (2009) menemukan bahwa beberapa

sektor seperti sektor Pertanian, Listrik, Gas, dan Air Bersih, Bangunan, serta Pengangkutan dan Transportasi memiliki *share* GDP riil yang berpengaruh positif terhadap *employment share*, sedangkan sektor Penggalian dan Pertambangan, Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Keuangan, Persewaan, serta sektor Jasa lainnya justru memiliki *share* yang negatif. Beberapa faktor yang melatarbelakangi perbedaan respon sektoral terhadap naik atau turunnya *share* GDP riil terhadap *employment share* di masing-masing sektor usaha antara lain: kemampuan atau keahlian tenaga kerja sektoral, produktivitas tenaga kerja sektoral, dan perbedaan tingkat upah sektoral.

Dampak kedua simulasi terhadap perubahan harga-harga diperlihatkan pada tabel 4. Kenaikan harga faktor produksi tenaga kerja (upah), meningkatkan biaya produksi dan menaikkan harga produksi. Nominal konsumsi menjadi turun. Kenaikan harga ini

juga berdampak pada penurunan ekspor, karena harga barang menjadi relatif lebih mahal sehingga tingkat kompetitifnya menjadi berkurang. GDP dari sisi *expenditure* menurun sedangkan pengeluaran pemerintah menjadi bertambah. Dari tabel 4 terlihat bahwa semakin tinggi kenaikan harga faktor produksi tenaga kerja, dampaknya terhadap harga-harga juga semakin besar.

Dampak Simulasi terhadap Pendapatan dan Kemiskinan

Kinerja ekonomi makro suatu negara akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, meskipun dalam kajian yang sama ditemukan bahwa inflasi tidak memiliki dampak terhadap kemiskinan (Balke and Slottje, 2003). Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan akhirnya menurunkan angka kemiskinan (Dollar and Kraay, 2001; Fields, 1989; Squire, 1993; Bruno et al., 1998). Pertumbuhan ekonomi juga berhubungan dengan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan perubahan distribusi pendapatan (Bourguignon, 2002; Klassen, 2005; Dollar and Kraay, 2002).

Menggunakan model CGE, Fane dan War (2002) di Indonesia, menyimpulkan bahwa jika semakin besar pertumbuhan yang dapat meningkatkan *return* terhadap faktor yang merupakan sumber pendapatan bagi kaum miskin, maka semakin besar pula kemungkinan untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Simatupang dan Dermoredjo (2003) dalam studinya menemukan bahwa: (1) dampak produk domestik bruto (PDB) terhadap insiden kemiskinan bervariasi menurut sektor; (2) PDB sektor pertanian memiliki dampak lebih besar terhadap kemiskinan di pedesaan, sedangkan kemiskinan di perkotaan dominan dipengaruhi oleh PDB sektor industri; (3) PDB sektor lain (nonpertanian dan industri) juga berpengaruh terhadap kemiskinan di pedesaan; (4) insiden kemiskinan juga dipengaruhi oleh harga beras.

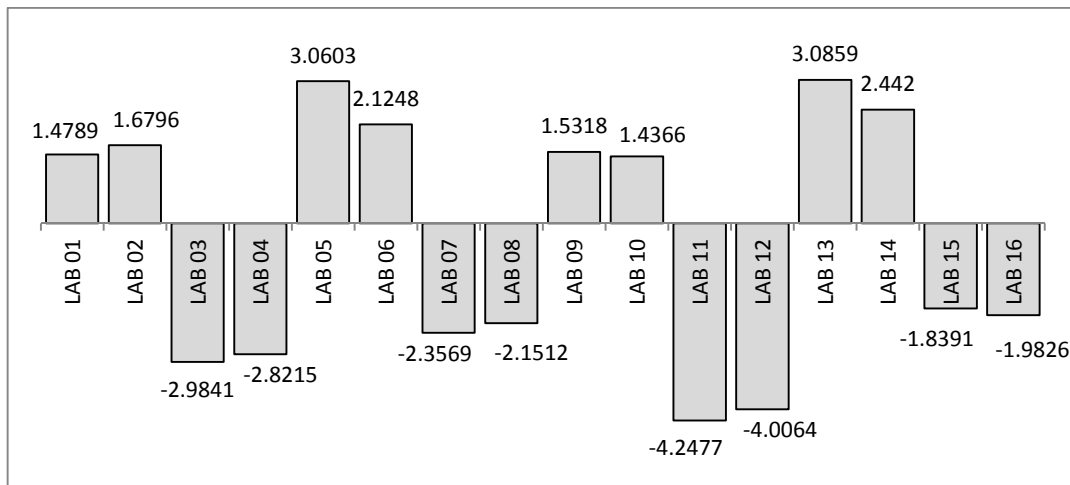
Kenaikan upah minimum akan berpengaruh terhadap penghasilan riil dari pe-

kerja di sektor informal (Smeru, 2001). Dampak simulasi kenaikan upah riil sebesar 9,33 persen terhadap tingkat pendapatan faktor produksi tenaga kerja diperlihatkan pada Gambar 7. Hasil simulasi memperlihatkan bahwa kenaikan upah menyebabkan naiknya pendapatan faktor produksi tenaga kerja penerima upah baik di desa maupun di kota (LAB 01, 02, 05, 06, 09, 10, 13, dan 14). Namun sebaliknya dirasakan oleh tenaga kerja bukan penerima upah, kenaikan upah justru menurunkan tingkat pendapatan mereka. Hal ini dapat difahami bahwa ketika tingkat upah naik, berarti biaya produksi juga naik. Kondisi ini menurunkan tingkat keuntungan (pendapatan) mereka relatif dibanding dengan tingkat pendapatan sebelum kenaikan upah. Dibanding dengan sektor pertanian, kenaikan tingkat pendapatan pada sektor nonpertanian lebih tinggi, namun dibanding antara desa dan kota, perubahan kenaikan pendapatan pekerja di desa secara umum sedikit lebih tinggi daripada pekerja di kota.

Bila dampak kenaikan UMR ditinjau dari sisi rumah tangga sesuai dengan klasifikasi pada SAM, maka perubahan pendapatan rumah tangga akibat kenaikan UMR tersebut diperlihatkan pada tabel 5.

Kenaikan UMR sebesar 9,33 persen hanya memberi dampak positif terhadap tingkat pendapatan dua kelompok rumah tangga, yaitu buruh di sektor pertanian, dan kelompok pengusaha bebas golongan rendah, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, dan buruh kasar pada sektor nonpertanian di perkotaan, sedangkan kelompok rumah tangga pengusaha baik di desa maupun di kota secara umum mengalami penurunan relatif dibanding dengan tingkat pendapatannya.

Karena garis kemiskinan antara desa dan kota berbeda, maka untuk melihat dampak kenaikan upah riil terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga, 10 kelompok rumah tangga seperti pada tabel 5 diagregasi menjadi 14 kelompok dengan pemisahan antara desa dan kota.



Gambar 7
Dampak Simulasi Kebijakan Menaikkan UMR riil sebesar 9,33 persen terhadap Perubahan Pendapatan Tenaga Kerja (%)
 Sumber: Hasil Penelitian

Tabel 5
Dampak Simulasi Kebijakan Menaikkan UMR riil sebesar 9,33 persen terhadap Pendapatan Rumah tangga

Rumah tangga			Perubahan (%)
Pertanian	Buruh		HH01 1,01622
	Pengusaha Pertanian	Pengusaha memiliki tanah 0,000 ha - 0,500 ha	HH02 -1,08723
		Pengusaha memiliki tanah 0,500 ha -1,00 ha	HH03 -1,08924
		Pengusaha memiliki tanah 1,000 ha lebih	HH04 -1,09105
Pedesaan	Pengusaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar	HH05 -0,17802	
	Bukan angkatan kerja dan golongan tidak jelas	HH06 -0,75323	
Bukan Pertanian	Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja TU dan penjualan golongan atas	HH07 -1,47485	
	Perkotaan	Pengusaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar	HH08 0,20970
		Bukan angkatan kerja dan golongan tidak jelas	HH09 -0,00301
		Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja TU dan penjualan golongan atas	HH10 -0,81788

Sumber: Hasil Penelitian

Menggunakan garis kemiskinan Maret 2013, dampak simulasi kenaikan upah terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga diperlihatkan pada tabel 6.

Meskipun dampaknya relatif kecil, hasil simulasi menunjukkan bahwa kenaikan upah riil sebesar 9,33 persen cenderung menaikkan angka kemiskinan. Secara total angka kemiskinan meningkat sebesar 0,2 persen. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan nilai P_0 dari 0.16231 menjadi 0.16430. Artinya bahwa kenaikan upah minimum secara umum tidak dapat mengurangi angka kemiskinan. Meskipun kenaikan upah menyebabkan kenaikan sebagian pendapatan faktor produksi (seperti pada Gambar 2), namun kenaikan tersebut ti-

dak cukup kuat untuk mengimbangi penurunan pendapatan yang dialami oleh faktor produksi lainnya. Temuan ini sejalan dengan kajian Woyanti (2013) dan Smeru (2001), bahwa kenaikan upah minimum berpengaruh positif terhadap angka kemiskinan. Kajian Wijaksono (2009) menemukan bahwa bila kebijakan peningkatan upah minimum dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, maka tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggilah yang akan memperoleh manfaatnya, namun kelompok ini relatif sedikit, sehingga secara keseluruhan angka kemiskinan dan pengangguran dapat bertambah.

Tabel 6
Dampak Simulasi terhadap Tingkat Kemiskinan Rumah tangga

RT	FGT Indeks								
	Baseline			Simulasi 2			Δ Sim 2		
	a= 0	a = 1	a = 2	a = 0	a = 1	a = 2	a =0	a =1	a = 2
Total	0,16231	0,03252	0,00965	0,16430	0,03302	0,00983	0,00200	0,00050	0,00018
HH01R	0,27278	0,04867	0,01290	0,26273	0,04644	0,01220	-0,01006	-0,00223	-0,00071
HH01U	0,32776	0,06430	0,01840	0,31605	0,06167	0,01749	-0,01171	-0,00262	-0,00091
HH02R	0,22257	0,04388	0,01298	0,23197	0,04587	0,01367	0,00940	0,00199	0,00069
HH02U	0,17417	0,03302	0,00857	0,18018	0,03458	0,00911	0,00601	0,00155	0,00055
HH03R	0,12563	0,02136	0,00525	0,13071	0,02253	0,00562	0,00508	0,00117	0,00036
HH03U	0,43026	0,10680	0,03661	0,43954	0,11037	0,03817	0,00928	0,00357	0,00156
HH04R	0,19832	0,03483	0,00909	0,20112	0,03662	0,00967	0,00279	0,00179	0,00058
HH04U	0,12739	0,02536	0,00758	0,13376	0,02653	0,00798	0,00637	0,00117	0,00040
HH05R	0,06496	0,00962	0,00228	0,06513	0,00972	0,00231	0,00017	0,00010	0,00003
HH06R	0,05792	0,00983	0,00255	0,05915	0,01019	0,00267	0,00123	0,00037	0,00011
HH07R	0,03128	0,00462	0,00106	0,03276	0,00502	0,00117	0,00148	0,00040	0,00011
HH08U	0,23411	0,04986	0,01544	0,23273	0,04948	0,01530	-0,00139	-0,00038	-0,00014
HH09U	0,25861	0,05779	0,01852	0,25861	0,05780	0,01852	0,00000	0,00001	0,00000
HH10U	0,14871	0,02908	0,00837	0,15181	0,03007	0,00871	0,00311	0,00099	0,00035

Sumber: Hasil Penelitian; HH: *Household* (Rumahtangga); U: *Urban* (Kota); R: *Rural* (Desa)

Dalam perekonomian yang tetap, kenaikan upah akibat regulasi dapat menyebabkan kontraksi ekonomi dan menambah angka kemiskinan, namun bila kenaikan upah tersebut lebih didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat, maka kenaikan upah akan mengurangi angka kemiskinan.

Selain itu, kenaikan upah juga memicu kenaikan ongkos produksi yang akhirnya menaikkan harga dan menurunkan daya beli masyarakat. Seperti diperlihatkan pada Gambar 6, simulasi menaikkan upah menyebabkan naiknya indeks harga konsumen (CPI) sebesar 2,21 persen, mengurangi tingkat konsumsi riil dan menurunkan ekspor.

Walau secara umum, dampak kenaikan upah terhadap meningkatnya jumlah rumah tangga miskin relatif kecil, namun bila dibanding dengan kelompok lain, kelompok rumah tangga pengusaha kecil bidang pertanian di desa (HH02R) dan di kota (HH03U) lebih rentan mengalami kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) kenaikan upah beserta rentetannya, sangat berdampak terhadap pendapatan rumah tangga di sektor pertanian (lihat tabel 5); (2) pengusaha kecil dengan luas lahan lebih kecil atau sama dengan satu hektar memiliki modal, output, dan keuntungan serta penggunaan tenaga kerja yang relatif sedikit, sedangkan *marginal product* dari pekerja di sektor ini biasanya relatif besar. Oleh karena itu, pengurangan tenaga kerja akibat kenaikan upah akan berdampak pada pengurangan produksi yang relatif besar yang juga berdampak pada pengurangan pendapatan yang relatif besar pula.

Merujuk pada tabel 5, meskipun rumah tangga HH04, merasakan dampak penurunan tingkat pendapatan yang lebih besar dibanding HH02 dan HH03, namun rumah tangga ini memiliki skala produksi yang lebih besar. Demikian juga bila dibanding dengan HH07; kondisi ini menandakan bahwa banyak rumah tangga pada kelompok tersebut (HH02 dan HH03) yang pendapatannya (sebelum simulasi) berada sedikit di atas garis kemiskinan dibanding dengan kelompok lain, sehingga lebih rentan terhadap perubahan perekonomian. Sedikit guncangan dapat membawa mereka jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Kenaikan upah juga berdampak terhadap turunnya jumlah rumah tangga miskin di 3 kelompok dari 14 kelompok yang ada. Penurunan jumlah rumah tangga miskin terbesar berada pada kelompok buruh sektor pertanian di kota (HH01U) sebesar 1,171 persen, dan di desa (HH01R) sebesar 1,006 persen, serta kelompok pengusaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, dan buruh kasar selain sektor pertanian di kota (HH08U) sebesar 0,038 persen. Hal ini

sejalan dengan temuan pada tabel 5 dan temuan sebelumnya. Kondisi ini menandakan bahwa kenaikan harga faktor tenaga kerja (upah) mampu menaikkan pendapatan para pekerja penerima upah (terutama buruh), dan kenaikan tersebut dapat mengimbangi kenaikan harga-harga barang. Dengan kata lain, kenaikan upah dapat menaikkan daya beli riil dari ketiga kelompok sehingga mampu mengangkat mereka yang sebelumnya berada di bawah garis kemiskinan (miskin) menjadi naik ke atas garis kemiskinan (tidak miskin).

Pada tabel 5 terlihat bahwa dampak kenaikan upah terhadap pendapatan rumah tangga di sektor pertanian secara umum lebih tinggi di banding dari sektor nonpertanian. Kondisi ini sejalan dengan tabel 6 bahwa rata-rata peningkatan jumlah rumah tangga miskin di sektor pertanian (0,21 persen) lebih tinggi dibanding dengan sektor nonpertanian (0,08 persen). Hasil ini sesuai dengan kajian Suselo dan Tarsidin (2008). Menggunakan model regresi HCR (*Head Count Ratio*) dan IGR (*Income Gap ratio*), disimpulkan bahwa sektor Pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap angka kemiskinan.

Kenaikan upah, menyebabkan meningkatnya *poverty gap index* (P1) dan *poverty severity index* (P2), kecuali pada kelompok rumah tangga buruh yang justru menurun. Namun secara umum, peningkatan kedua indeks tersebut relatif sangat kecil, baik secara total yaitu 0,050 persen dan 0,018 persen, maupun menurut kelompok rumah tangga.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil kajian ini, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Kenaikan upah minimum, dalam jangka pendek akan berdampak terhadap penurunan kinerja ekonomi makro, menaikkan tingkat harga, menurunkan tingkat konsumsi, ekspor serta output sektoral. (2) Kelompok rumah tangga bidang pertanian merupakan kelompok paling rentan terhadap dampak kenaikan upah. (3) Kenaikan upah dapat menambah pen-

dapatan rumah tangga kelompok buruh di sektor pertanian dan akhirnya menurunkan jumlah rumah tangga miskin pada kelompok tersebut. Namun secara total, kenaikan upah berdampak terhadap meningkatnya jumlah rumah tangga miskin, meskipun kenaikan tersebut relatif kecil. Artinya, kenaikan upah menyebabkan turunnya jumlah rumah tangga miskin di beberapa kelompok, dan sebaliknya bagi kelompok lainnya, tetapi dampak kenaikan upah secara total lebih memicu pada kenaikan jumlah rumah tangga miskin dibanding dari penurunannya.

Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah: (1) Kenaikan upah perlu mempertimbangkan sektor yang menjadi kantong kemiskinan bila tujuannya adalah mengurangi angka kemiskinan. (2) Kajian yang lebih mendalam dapat dilakukan untuk melihat dampak terhadap kemiskinan secara individu (bukan rumah tangga), dengan tingkat upah sektoral (bukan regional), sehingga dampaknya terhadap indikator ekonomi makro dan kemiskinan dapat lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. Profil Kemiskinan di Indonesia, *Berita Resmi Statistik* No. 47/07/Th.XVI, Juli 2013.

Balke, N. S. dan D. J. Slottje. 2003. Poverty and Change in the Macroeconomy: A Dynamic Macroeconometric Model. *The Review of Economics and Statistics* 75(1): 117-122.

BKFKD-RI (Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Republik Indonesia). 2008. *Pengembangan Model Computable General Equilibrium: Modul Pelatihan Tahap I*, Center for Economics and Development Studies (CEDs). Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung.

BKFKD-RI (Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Republik Indonesia). 2008a. *Applied General Equilibrium Model for Fiscal Policy (AGEFIS): Modul Pengembangan Kapasitas Model CGE Tahap II*,

Center for Economics and Development Studies (CEDs). Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung.

Bourguignon, F. 2002. The Growth Elasticity of Poverty Reduction: Explaining Heterogeneity across Countries and Time Periods. *DELTA Working Paper* 03.

Bruno, M., M. Ravallion, dan L. Squire. 1998. *Equity and Growth in Developing Countries: Old and New Perspectives on the Policy Issues*. Vito Tani and Ke-Young Chu, editors. *Income Distribution and High Growth*. MIT Press. Cambridge, MA.

Cockburn, J. 2001. *Trade Liberalisation and Poverty in Nepal: A Computable General Equilibrium Micro Simulation Analysis*. Centre for the Study of African Economies and Nuffield Collage (Oxford University) and CREFA. Universite Laval Quebec, Canada.

Das, M. B. dan Bank Dunia. 2004. *Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap pasar Tenaga Kerja: Kasus Timor Leste dalam Perspektif Komparatif*. Bank Dunia Jakarta.

Dollar, D. dan A. Kraay. 2001. Growth is Good for the Poor. *World Bank Policy Research Working Paper* 2587, Washington, D.C. World Bank.

———. 2002. Growth is Good for the Poor. *Journal of Economic Growth*.

Fane, G. dan P. War. 2002. How Economic Growth Reduces Poverty: A General Equilibrium Analysis for Indonesia. *Discussion paper* 453, Research Department. Inter American Development Bank. Washington, D. C.

Fields, G. S. 1989. Changes in Poverty and Inequality in the Developing Countries, *Mimeographed Paper*.

Flinn, C. J. 2006. Minimum Wage Effects on Labor Market Outcomes under Search, Matching, and Endogenous Contact Rates. *Econometrica* 74(4): 1013-1062.

ILO (International Labour Organization). 2013. *Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia: Memperkuat Peran Pekerjaan Layak Dalam Kestaraan Pertumbuhan*. Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta.

- Islam, I. dan S. Nazara. 2000. Minimum Wage and the Welfare of Indonesian Workers. *Occasional Discussion Paper Series 3*. ILO, Jakarta.
- Jantan, M. D., I. Maipita, Fitrawaty, dan I. Hamdani. 2013. The Impact of Diverting a Fuel Subsidy to the Agricultural Sector on Income Distribution and Poverty. *The International Journal of Interdisciplinary Environmental Studies* 7(2): 1-13.
- Klassen, S. 2005. Economic Growth and Poverty Reduction: Measurement and Policy Issues. *Working Paper 246* OECD Development Center.
- Maipita, I. 2010. The Effect of Direct Cash Aid (BLT) Distribution Toward Income and Poverty Level in Indonesia. *Journal of Economic and Business, Research Institute Gunadarma University* 16(1): 23-36.
- . 2013. *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*. Absolut Media, Yogyakarta.
- Maipita, I., M. D. Jantan, dan N. A. Razak. 2010. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi dan Angka Kemiskinan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia* 12(4): 421-456.
- Maipita, I., W. Hermawan, dan Fitrawaty. 2012. Reducing Poverty Through Subsidies: Simulation of Fuel Subsidy Diversion to Non-Food Crops. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia* 14(4): 369-387.
- Moller, S., E. Huber, J. D. Stephen, D. Bradley, dan F. Nielsen. 2003. Determinant of Relative Poverty in Advanced Capitalist Democracies. *American Sociological Review* 68(1): 22-51.
- Neumark, D. and O. Nizalova. 2007. Minimum Wage Effects in the Longer Run. *The Journal of Human Resources*, 42(2): 435-452.
- Pitaya. 2006. Dilematika Penetapan Upah Minim. *Mimbar Hukum* 18(2): 159-292.
- Putri, I. A. S. M. dan N. N. Yuliarni. 2013. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 2(10): 441-448.
- Saget, C. 2006. *Penentuan Besaran Upah Minimum di Negara Berkembang: Kegagalan dan Pemecahan Masalah*. International Labour Organization. Jakarta.
- Simatupang, P. dan S. Dermoredjo. 2003. Produk Domestik Regional Bruto, Harga dan Kemiskinan: Hipotesis Trickle Down Dikaji Ulang. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* 51(3): 291-324.
- Simon, K. I. P. dan R. Kaestner. 2004. Do Minimum Wages Affect Non-Wage Job Attributes? Evidence on Fringe Benefits. *Industrial and Labor Relations Review*, 58(1): 52-70.
- Smeru. 2001. *Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia*.
- Soekarni, M., I. Sugema, dan P. R. Widodo. 2009. Persistensi Pengangguran di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya Berdasarkan Analisis Data Mikro. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia* 12(2): 161-203.
- Son, H. H. dan N. Kakwani. 2004. Economic Growth and Poverty Reduction: Initial Conditions Matter. *Working Paper 2*, Agustus 2004. United Nations Development Programme.
- . 2004a. Economic Growth and Poverty Reduction: Initial Conditions Matter. *Working Paper 2*, Agustus 2004. United Nations Development Programme.
- Squire, L. 1993. Fighting Poverty. *American Economic Review*: 377-382.
- Stewart, M. B. 2004. The Employment Effects of the National Minimum Wage. *The Economic Journal* 114(494).
- Suselo, S. L. dan Tarsidin. 2008. Kemiskinan di Indonesia: Pengaruh Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia* 11(2): 155-194.
- Tarsidin. 2009. Pengangguran Struktural: Faktor Yang Mempengaruhi dan Dinamikanya. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia* 11(3): 201-231.

- Teulings, C. N. 2003. The Contribution of Minimum Wages to Increasing Wage Inequality. *The Economic Journal* 113(490): 801-833.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan. <http://www.menkokesra.go.id/node/334>, Diakses: tanggal 5 Januari 2014.
- Wijaksono, M. 2009. Dualisme Pasar Tenaga Kerja dan Dampak Upah Minimum. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (JESP)* 1(1): 67-73.
- Woyanti, N. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan UMP Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Pra dan Pasca Desentralisasi Fiskal. *Media Ekonomi dan Manajemen* 28(2): 28-43.
- Yusuf, A. A., D. Hartono, dan W. Hermawan. 2007. AGEFIS: Applied General Equilibrium for Fiscal Policy Analysis. *Working Paper in Economics and Development Studies* 07. Department of Economics, University of Padjadjaran.

Lampiran:

Lampiran 1: Upah Minimum 20 Provinsi dalam Rupiah

No	Provinsi	2012	2013	2014
1	NANGGROE ACEH D.	1,400,000	1,550,000	1,750,000
2	SUMUT	1,200,000	1,375,000	1,505,850
3	SUMBAR	1,150,000	1,350,000	1,490,000
4	RIAU	1,238,000	1,400,000	1,700,000
5	KEPULAUAN RIAU	1,015,000	1,365,087	1,665,000
6	JAMBI	1,142,500	1,300,000	1,502,300
7	BANGKA BELITUNG	1,110,000	1,265,000	1,640,000
8	BENGKULU	930,000	1,200,000	1,350,000
9	DKI JAKARTA	1,529,150	2,200,000	2,441,301
10	BANTEN	1,042,000	1,170,000	1,325,000
11	N T B	1,000,000	1,100,000	1,210,000
12	KALBAR	900,000	1,060,000	1,380,000
13	KALSEL	1,225,000	1,337,500	1,620,000
14	KALTENG	1,327,459	1,553,127	1,723,970
15	KALTIM	1,177,000	1,752,073	1,886,315
16	MALUKU	975,000	1,275,000	1,415,000
17	GORONTALO	837,500	1,175,000	1,325,000
18	SULTRA	1,032,300	1,125,207	1,400,000
19	SULTENG	885,000	995,000	1,250,000
20	PAPUA	1,515,000	1,710,000	1,900,000

Sumber : <http://finance.detik.com/read/2013/11/04/165026/2403726/4/sudah-20-provinsi-tetapkan-ump-2014-ini-daftar-angkanya>

Catatan: Pada saat kajian ini dilaksanakan, masih sebanyak 20 provinsi yang telah menetapkan upah minimumnya, sehingga besaran simulasi kenaikan UMP tahun 2014 diestimasi dari rata-rata kenaikan UMP untuk 20 provinsi.